

	News Title : Pendaftaran Izin Perdagangan Kripto Makin Ketat! Maksimal 16 Oktober 2024	
	Media Name : duniafintech.com	Journalist : -
	Publish Date : 23 August 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Kepala Bappebti), Yudhono Rawis (Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI))	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Berita	Topic : Bappebti Beri Batas Pendaftaran Izin Pedagang Kripto

Pendaftaran Izin Perdagangan Kripto Makin Ketat!
Maksimal 16 Oktober 2024

By **Kontributor** Agustus 23, 2024

Bagikan

f

x

p

g



BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Departemen Perdagangan Republik Indonesia



Pendaftaran Izin Perdagangan Kripto Makin Ketat! Maksimal 16 Oktober 2024

JAKARTA – Tidak bisa sembarang dalam berjualan cryptocurrency karena Bappebti telah menetapkan batas pendaftaran izin perdagangan kripto. Untuk memperkuat regulasi [aset kripto di Indonesia](#), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperkenalkan aturan baru.

Melalui Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2024 dijelaskan, Calon Pedagang Fiskal Aset Kripto (CPFAK) harus memenuhi syarat dan mendapatkan izin resmi paling lambat tanggal 16 Oktober 2024.

Setelah syarat dan berkas semua terpenuhi barulah mendapatkan izin resmi sebagai Pedagang Fiskal Aset Kripto (PFAK).

Aturan tersebut secara jelas mengatur Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fiskal Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappebti, Kasan menegaskan, semua pelaku usaha sektor kripto harus mematuhi aturan yang ada.

"Harus beroperasi sesuai dengan standar yang berlaku," paparnya.

Daftar Isi

Baru Ada 2 Perusahaan yang Lolos Syarat Izin Perdagangan Kripto

Persyaratan Izin Perdagangan Kripto

Baru Ada 2 Perusahaan yang Lolos Syarat Izin Perdagangan Kripto

Menurutnya, perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha hingga saat ini baru ada 2 perusahaan.

Kemudian, ada 13 CPFAK lainnya yang sedang dalam proses mendapatkan persetujuan.

13 CPFAK tersebut telah memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB).

"Kedepan semoga segera memperoleh persetujuan untuk menjadi PFAK," papar Kasan.

Mengutip data dari berbagai sumber yang ramai dibicarakan, Jumat (23/8/2024) Kepala Bappebti, Kasan mengatakan, ekosistem yang sehat dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan kripto.

Persyaratan Izin Perdagangan Kripto

Calon pedagang kata Kasan diberikan waktu untuk menyelesaikan semua persyaratan yang ada.

Untuk itu, pihak yang belum menyiapkan syarat tersebut, apabila sudah melewati batas waktu yang ditentukan maka tidak akan mendapatkan toleransi apapun.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menyusun dan menyiapkan sanksi bagi yang tidak patuh.

Mengacu pada Perba Nomor 8 Tahun 2024, perusahaan yang telah memiliki tanda daftar diwajibkan mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK.

Pengajuannya disampaikan kepada Bappebti dengan masa tenggat paling lambat satu bulan.

Hal itu terhitung setelah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Kasan menjelaskan, apabila perusahaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka tanda daftar mereka akan dibatalkan.

"Dianggap tidak berlaku lagi," tegas Kasan.

Peraturan yang disusun Bappebti mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Diantaranya Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI), Yudhono Rawis juga turut memberikan dukungan.

Ia menilai, peraturan tersebut sangat diperlukan agar ada kejelasan regulasi dalam pasar kripto.

"Untuk membantu menyaring pelaku usaha yang serius," tuturnya.

Rawis mengatakan, perusahaan diminta berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang telah ditetapkan.

Sehingga sambung Rawis, dapat menciptakan pasar yang lebih stabil dan aman bagi semua pihak.